

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LAKIP)

TAHUN 2021



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kami telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2021 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mendapatkan kepercayaan dan *stakeholder*.

Pembuatan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Laporan hasil kinerja selama satu tahun ini merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Bilamana organisasi mencapai keberhasilan maka akan dipertahankan, dan jika organisasi ini menemui kegagalan, maka akan diperbaiki seoptimal mungkin.

Demikian laporan hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kependudukan.

Sumber, 02 Februari 2022

PII. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Singkat Organisasi	1
B. Isu Strategis yang Berpengaruh	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Dasar Hukum	3
E. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategi Organisasi	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan dan Sasaran	6
3. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	30
C. Akuntabilitas Keuangan	31
D. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	33
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021	
2. Penetapan Kinerja (Tapkin) TA 2021	
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon membawahi satu Bagian Sekretariat dengan tiga Kepala Sub Bagian, dan tiga Kepala Bidang dengan enam Kepala Seksi, sebagaimana struktur organisasi terlampir.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2021, terdiri atas :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c. Seksi Kerja Sama Dan Inovasi Pelayanan

B. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.



Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus didukung melalui pelayanan yang prima dan profesional oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif dapat terbina untuk menciptakan suatu kesatuan gerak dan langkah yang kondusif dalam satu rantai kerja yang harmonis.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa proses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan"

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 tahun 2021 ayat (2) menyelenggarakan Fungsi antara lain :

1. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
3. Pelayanan pendaftaran penduduk ;
4. Pelayanan pencatatan sipil ;
5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan ;
6. Pengelolaan profil kependudukan
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
8. Pengevaluasian dan pelaporan dan Pencatatan Sipil;dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Organisasi

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20)
4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 34).

2. Dasar Hukum Operasional

Adapun Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 tentang pencatatan kelahiran melebihi satu tahun tidak memerlukan penetapan pengadilan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
10. Peraturan Menpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang pelaksanaan putusan MK
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Sanksi Administrasi Kependudukan denda Keterlambatan Penetapan bagi Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0–18 Tahun dan Akta Kematian,

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diawali dengan ikhtisar eksekutif yang didalamnya memuat gambaran/penjelasan umum sebagai inti dan keseluruhan isi laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek-aspek strategik organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategik, penetapan kinerja dan anggaran tahun 2021. Pada bab ini akan disampaikan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2021.

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. Visi dan Misi

A. VISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mempunyai VISI :

"Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon "

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

<p><i>1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi Kependudukan .</i></p>

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsi yang diemban, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan juga menggambarkan isu-isu strategis yang harus dihadapi dan diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dapat merealisasikan misi yang diemban. Adapun rumusan tujuan dalam

perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatkan Kinerja pelayanan Publik

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja pelayanan Publik

Sasaran		Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap.

3. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan

faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kinerja aparaturnya dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja perangkat daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layangan
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<i>Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap</i>	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Pembawa Kependudukan
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek kependudukan serta kebutuhan yang lain

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	75 Prosen	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.055.569.906
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	2 Dokumen	Prosentase Peningkatan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya	30.181.800
		Jumlah dokumen Pra RKA DAK Non Fisik, RKA DAK Non Fisik SKPD yang diselesaikan	2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.973.300
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD, LKPJ, LAKIP, IKU dan PERKIN)	2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.781.700
		Tersedianya Dokumen Laporan IKM	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.058.600
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan	63 Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.062.066.000
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.528.600
		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2.786.400
				Kegiatan Administrasi Kepegawelan Perangkat Daerah	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi	80 orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	41.614.500	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Kependudukan yang hadir			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) atau kegiatan sejenis lainnya	40 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11.151.500
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	10 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.575.200
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	15 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.591.480.990
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	2 Buah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.791.900
		Jumlah Jamuan makan yang disiapkan	528 Dus	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.840.000
		Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	19 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.338.000
		Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	3 Surat Kabar/Koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-undangan	15.336.000
		Jumlah jenis ATK yang tersedia	65 Jenis	Penyediaan Bahan/Material	109.086.100
		Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.924.200
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Rekening yang di bayar	3 Jenis	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.099.918
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.754.000
		Jumlah sarana dan prasarana pelindung diri yang tersedia	7 Jenis	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.750.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda dua yang terbayarkan	24 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.592.500
		Jumlah Pajak Kendaraan / STNK bermotor roda empat yang terbayarkan	10 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	24 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.500.000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM	7 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	1 Unit Bangunan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	376.326.700
2	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik	275.000 keping	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.063.212.000
		Terbitnya Kartu identitas Anak (KIA)	35.000 keping		
		Terbitnya Kartu Keluarga	265.000 Lembar		
		Jumlah operator SIAC dan Admin yang mendukung pelayanan Adminduk di dinas dan kecamatan yang terbayarkan	60 Orang		
		Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP E1	60 orang	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.727.500
		Jumlah pemohon yang menerima layanan Surat keterangan pindah,	27.000 pemohon	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	72.391.200

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		datang, SKTT		atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
		Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran	65.000 Dok Akta Kelahiran	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	481.445.900
		Terbitnya Dokumen Akta Kematian	1.200 Dok Akta Kematian		
		Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan	55 Dok Akta Perkawinan		
		Terbitnya Dokumen Akta perceraian	9 Dok Akta perceraian		
		Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	30 Dokumen		
		Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	1 Dokumen Digital	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	95.351.900
		Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile penerbitan akta kelahiran	100 Orang		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		Database Penduduk yang Valid	5 Dokumen	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.119.900
		Dokumen Pelaporan Pemanfaatan Data dan Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat	20 Dokumen	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12.603.800
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan			
		Jumlah NIK yang terkonsolidasi			
		Tersedianya Data Admuduk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17.988.800
		Jumlah orang atau peserta sosialisasi terkait pengelolaan informasi Admuduk	250 Orang	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Berfungsi dan Terkoneksi SIAK	41 unit	Penyajian Data Kependudukan Yang	312.966.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Online di 40 Kec dan Dinas		Akurat Dan Dapat Dieranggungjawabkan	
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	70 Orang	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	6.381.300
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Orang		
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
		Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dan tiap-tiap sub kegiatan	1 Dokumen	Penyusunan Profil Data Pengembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	60.501.800

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Eksistensi dari institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai salah satu fungsi Manajemen yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut, lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berperan aktif untuk mewujudkannya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan mencoba mengimplementasikan rencana strategis tahun 2019-2024 yang pada tahun 2021 ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

SISTEM AKIP & POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA



Pada tahun anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas

- Sasaran ini meliputi indikator adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.16.085.569.906,- dan terealisasi sebesar Rp.13.615.379.401,- sisa sebesar Rp.2.470.190.505,- atau tercapai sebesar 84,64 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi, Prosentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah dipenuhi dan yang seharusnya dan Prosentase Peningkatan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.100.995.400,- dan terealisasi sebesar Rp.68.332.400,- sisa sebesar Rp.32.663.000,- atau tercapai sebesar 67,66%

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.181.800,- dan terealisasi sebesar Rp.28.111.800,- sisa sebesar Rp.2.070.000,- atau tercapai sebesar 93,14%.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan dan Jumlah dokumen renstra, review renstra yang diselesaikan

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.973.300,- dan terealisasi sebesar Rp.6.423.300,- sisa sebesar Rp.27.550.000,- atau tercapai sebesar 18,91%.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen Pra RKA DAK Non Fisik, RKA DAK Non Fisk SKPD yang diselesaikan

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.781.700,- dan terealisasi sebesar

Rp.11.781.700,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%.

Sub Outputnya adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD,LKPJ, LAKIP, IKU dan PERKIN)

- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.058.600,- dan terealisasi sebesar Rp.22.015.600,- sisa sebesar Rp.3.043.000,- atau tercapai sebesar 87,86 %.

Sub Outputnya adalah Tersedianya Dokumen Laporan IKM dan Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 8.090.411.000,- dan terealisasi sebesar RP.7.145.735.127,- sisa sebesar Rp.944.675.873,- atau tercapai sebesar 88,32%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan Administrtasi Keuangan yang dibuat.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.082.096.000,dan terealisasi sebesar Rp.7.138.170.127,- sisa sebesar Rp.943.925.873,- atau tercapai sebesar 88,32 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.528.600,- dan terealisasi sebesar Rp.5.528.600,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.786.400,- dan terealisasi sebesar Rp.2.036.400,- sisa sebesar Rp.750.000,- atau tercapai sebesar 73,08 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.52.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.52.766.000,- atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.614.500,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp. 41.614.500,- atau tercapai sebesar 0,00 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang hadir.

- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.151.500,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.11.151.500,- atau tercapai sebesar 0,00 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah Peserta yang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) atau kegiatan sejenis lainnya.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.5.753.484.703,- dan terealisasi sebesar Rp.1.312.907.687,- sisa sebesar Rp.1.312.907.687,- atau tercapai sebesar 81,42%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan kantor.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.575.200,- dan terealisasi sebesar Rp.15.575.200,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%

Sub Outputnya adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.591.480.990,- dan

terrealisasi sebesar Rp.5.397.421.700,- sisa sebesar Rp.1.194.059.290,- atau tercapai sebesar 88,18%

Sub Outputnya adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.791.900,- dan terrealisasi sebesar Rp.1.050.000,- sisa sebesar Rp.741.900,- atau tercapai sebesar 58,60%

Sub Outputnya adalah Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.840.000,- dan terrealisasi sebesar Rp.3.954.000,- sisa sebesar Rp.11.886.000,- atau tercapai sebesar 24,96%

Sub Outputnya adalah Jumlah Jamuan makan yang disiapkan.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.338.000,- dan terrealisasi sebesar Rp.37.034.500,- sisa sebesar Rp.16.303.500,- atau tercapai sebesar 69,43%

Sub Outputnya adalah Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.336.000,- dan terrealisasi sebesar Rp.14.986.000,- sisa sebesar Rp. 350.000,- atau tercapai sebesar 97,72%

Sub Outputnya adalah Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.086.100,- dan terrealisasi sebesar Rp.98.742.300,- sisa sebesar Rp.10.343.800,- atau tercapai sebesar 90,52%

Sub Outputnya adalah Jumlah jenis ATK yang tersedia.

- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.924.200,- dan terrealisasi sebesar Rp.184.701.003,- sisa sebesar Rp.79.223.197,- atau tercapai sebesar 69,98%

Sub Outputnya adalah Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.273.603.916,- dan terealisasi sebesar RP.170.812.181,- sisa sebesar Rp.102.791.735,- atau tercapai sebesar 62,43%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.099.916,- dan terealisasi sebesar Rp.132.072.481,- sisa sebesar Rp.98.027.435,- atau tercapai sebesar 57,40%

Sub Outputnya adalah Jumlah Rekening yang di bayar

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.990.000,- sisa sebesar Rp.4.764.000,- atau tercapai sebesar 87,04%

Sub Outputnya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.749.700,- sisa sebesar Rp.300,- atau tercapai sebesar 100,00%

Sub Outputnya adalah Jumlah sarana dan prasarana pelindung diri yang tersedia.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.501.421.200,- dan terealisasi sebesar RP.477.034.990,- sisa sebesar Rp.24.386.210,- atau tercapai sebesar 95,14%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan BMD Yang Sesuai Standard Kebutuhan Pelayanan Prima.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.12.592.500,- dan terealisasi sebesar Rp.8.407.100,- sisa sebesar Rp.4.185.400,- atau tercapai sebesar 66,76%

Sub Outputnya adalah Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda empat dan roda dua yang terbayarkan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.101.485.000,- sisa sebesar Rp.11.015.000,- atau tercapai sebesar 90,12%

Sub Outputnya adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.376.328.700,- dan terealisasi sebesar Rp.367.142.890,- sisa sebesar Rp.9.185.810,- atau tercapai sebesar 97,56%

Sub Outputnya adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati.

2. Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap

Sasaran ini indikatornya adalah Rata-rata Prosentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap (KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn)

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Alokasi anggaran untuk Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp.1.153.330.700,- dan terealisasi sebesar Rp.1064.342.161,- sisa sebesar Rp.88.988.539,- atau tercapai sebesar 92,28%.

Outcome Program ini adalah Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA, Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK) dan Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp.1.153.330.700,- dan terealisasi sebesar RP.1.064.342.161,- sisa sebesar Rp.88.988.539,- atau tercapai sebesar 92,28%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dan tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.063.212.000,- dan terealisasi sebesar Rp.976.166.676,- sisa sebesar Rp.85.045.324,- atau tercapai sebesar 92,00%.

Sub Outputnya adalah Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA), Terbitnya Kartu Keluarga

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.727.500,- dan terealisasi sebesar Rp.15.152.500,- sisa sebesar Rp.2.575.000,- atau tercapai sebesar 85,47%

Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP E!

- c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.391.200,- dan terealisasi sebesar Rp.71.022.985,- sisa sebesar Rp.1.368.215,- atau tercapai sebesar 98,11%

Sub Outputnya adalah Jumlah pemohon yang menerima layanan Surat keterangan pindah, datang, SKTT.

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran untuk Program Pencatatan Sipil sebesar Rp.576.797.800,- dan terealisasi sebesar Rp.571.018.470,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 99,00%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK. Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp.576.797.800,- dan terealisasi sebesar Rp.571.018.470,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 99,00%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.481.445.900,- dan terealisasi sebesar Rp.475.666.570,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 98,80%.

Sub Outputnya adalah Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran, Terbitnya Dokumen Akta Kematian, Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan, Terbitnya Dokumen Akta perceraian, Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

- b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.351.900,- dan terealisasi sebesar Rp.95.351.900,- sisa sebesar Rp.- atau tercapai sebesar 100,00%

Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.409.454.900,- dan terealisasi sebesar Rp.344.921.667,- sisa sebesar Rp.64.533.233,- atau tercapai sebesar 84,24%.

Outcome Program ini adalah Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus dan Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.60.723.500,- dan terealisasi sebesar Rp.17.500.000,- sisa sebesar Rp.43.223.500,- atau tercapai sebesar 28,82%

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.119.900,- dan terealisasi sebesar Rp.12.375.000,- sisa sebesar Rp. 35.744.900,- atau tercapai sebesar 25,72%.

Sub Outputnya adalah Dokumen Database Penduduk yang Valid.

b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.603.600,- dan terealisasi sebesar Rp.5.125.000,- sisa sebesar Rp.7.478.600,- atau tercapai sebesar 40,66%

Sub Outputnya adalah Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.342.340.100,- dan

terrealisasi sebesar Rp.325.071.667,- sisa sebesar Rp.17.268.433,- atau tercapai sebesar 94,96%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselenggara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.988.800,- dan terrealisasi sebesar Rp.9.775.000,- sisa sebesar Rp.8.213.800,- atau tercapai sebesar 54,34%.

Sub Outputnya adalah Tersedianya Data Adminduk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)

- b. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.385.300,- dan terrealisasi sebesar Rp.4.325.000,- sisa sebesar Rp.7.060.300,- atau tercapai sebesar 37,99%

Sub Outputnya adalah Jumlah orang atau peserta sosialisasi terkait pengelolaan informasi Adminduk

- c. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.312.956.000,- dan terrealisasi sebesar Rp.310.971.667,- sisa sebesar Rp.1.994.333,- atau tercapai sebesar 99,36%

Sub Outputnya adalah Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.6.391.300,- dan terrealisasi sebesar Rp.2.350.000,- sisa sebesar Rp.4.041.300,- atau tercapai sebesar 36,77%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelola Administrasi Kependudukan / Adminduk yang terbina.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.391.300,-

dan terealisasi sebesar Rp.2.350.000,- sisa sebesar Rp.4.041.300,- atau tercapai sebesar 36,77%.

Sub Outputnya adalah Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar Rp.60.591.800,- dan terealisasi sebesar Rp.54.145.833,- sisa sebesar Rp.6.445.967,- atau tercapai sebesar 89,36%.

Outcome Program ini adalah Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.60.591.800,- dan terealisasi sebesar Rp.54.145.833,- sisa sebesar Rp.6.445.967,- atau tercapai sebesar 89,36%.

Output Kegiatan ini Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.119.900,- dan terealisasi sebesar Rp.60.591.800,- dan terealisasi sebesar Rp.54.145.833,- sisa sebesar Rp.6.445.967,- atau tercapai sebesar 89,36%

Sub Outputnya adalah Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir.

Adapun target dan capaian Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	250.000	169.513
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200.000	270.183
3	Cakupan Surat Pindah Datang	27.000	38.276
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	25.000	7.065
5	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65.000	55.001
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1.200	10.992
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan		60
	Akta Perceraian		7
	Pengakuan Anak		2
	Pengesahan Anak		28
	Pengangkatan Anak		5

A. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2014 – 2019, ada 4 (empat) sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan ada 2 (dua) sasaran yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu :

1. Meminimalisir keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pada tahun 2021 target penerbitan KTP-EI sebanyak 200.000 keping dan KK sebanyak 250.000. Realisasi untuk tahun 2021 ini penerbitan KTP sebanyak 270.183 keping atau 135,1%, dan KK sebanyak 169.513 lembar atau 67,8% .

2. Terlayannya Hak-hak Status Pribadi dan Status Hukum Bagi Penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan target penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 sejumlah 65.000 lembar, adapun realisasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN
1	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65,000	55,001
2	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1,200	10,992
3	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan		60
	Akta Perceraian		7
	Pengakuan Anak		2
	Pengesahan Anak		28
	Pengangkatan Anak		5

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA	%
	BELANJA DAERAH	18,285,745,106	15,649,807,532	2,635,937,574	85,58%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,153,330,700	1,064,342,161	88,988,539	92,28%
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,153,330,700	1,064,342,161	88,988,539	92,28%
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1,063,212,000	978,166,876	85,045,324	92,00%
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17,727,500	15,152,500	2,575,000	85,47%
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	72,391,200	71,022,985	1,368,215	98,11%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	576,797,800	571,018,479	5,779,330	99,00%
2	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	576,797,800	571,018,479	5,779,330	99,00%
4	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	481,445,900	475,666,579	5,779,330	98,80%
5	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	85,351,900	95,351,900	-	100,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	409,454,900	344,921,887	64,533,233	84,24%
3	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	86,723,500	17,500,000	43,223,500	28,82%
6	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48,119,900	12,375,000	35,744,900	25,72%
7	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12,603,600	5,125,000	7,478,600	40,65%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	343,340,100	328,071,887	17,268,433	94,98%
8	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17,986,800	9,776,000	8,213,800	54,34%
9	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11,385,300	4,325,000	7,060,300	37,99%

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA	%
10	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	312,960,000	310,971,667	1,994,333	99.36%
6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,391,300	2,350,000	4,041,300	36.77%
11	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	6,391,300	2,350,000	4,041,300	36.77%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	60,591,800	54,145,833	6,445,967	89.36%
6	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	60,591,800	54,145,833	6,445,967	89.36%
12	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	60,591,800	54,145,833	6,445,967	89.30%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,085,569,906	13,615,379,401	2,470,190,505	84.64%
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,995,400	68,332,400	32,663,000	67.66%
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,181,800	28,111,800	2,070,000	93.14%
14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33,673,300	6,423,300	27,250,000	18.91%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,781,700	11,781,700	-	100.00%
16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,058,600	22,015,600	3,043,000	87.86%
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,090,411,000	7,148,735,127	944,675,873	88.32%
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,082,096,000	7,136,170,127	943,925,873	88.32%
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,528,600	5,528,600	-	100.00%
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,786,400	2,036,400	750,000	73.08%
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52,766,000	-	52,766,000	0.00%
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	41,614,500	-	41,614,500	0.00%
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11,151,500	-	11,151,500	0.00%
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,066,372,300	5,753,464,703	1,312,907,687	81.42%
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,575,200	15,575,200	-	100.00%
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,501,480,900	5,397,421,700	1,194,059,290	81.86%
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,791,900	1,050,000	741,900	58.60%
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,840,000	3,954,000	11,886,000	24.96%
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	53,338,000	37,034,500	16,303,500	69.43%
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,336,000	14,966,000	350,000	97.72%
28	Penyediaan Bahan/Material	109,086,100	98,742,300	10,343,800	90.52%
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263,924,200	184,701,003	79,223,197	69.98%
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,603,916	179,812,181	102,791,735	62.43%

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA	%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.099,916	132.072,481	98.027,435	57,40%
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkingan Kantor	36.754,000	31.990,000	4.764,000	87,04%
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.750,000	6.749,700	300	100,00%
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.421,200	477.034,390	24.386,810	95,14%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.592,500	8.407,100	4.185,400	66,75%
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.500,000	101.465,000	11.035,000	90,21%
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	376.326,700	367.142,860	9.183,840	97,56%
J U M L A H		18.285.746.106	16.848.807.832	2.436.937.874	86,58%

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Untuk mengimbangi rencana dan realisasi anggaran, maka pada tahun anggaran 2022 akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana melalui perencanaan yang lebih matang dan meminimalisir terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang menimbulkan pemborosan.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2021 dengan 2 (dua) sasaran tersebut dalam renstra masih dalam proses pencapaian.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam tahun 2021 telah berjalan dengan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Indikator dan kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator sasaran yang sedang dilaksanakan (masih berjalan) dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Sumber, 02 Februari 2022

PIR KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SASARAN STRATEGIS

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: KESATU

NO	ACUSTRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEDAIATAN / SUB KEDAIATAN	TARGET			
		TK I	TK II	TK III	TK IV				TK I	TK II	TK III	TK IV
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA						
Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan						Indeks Kepuasan Masyarakat						
Cakupan Kinerja yang sudah mendapat Dukungan Keperencanaan dan Peningkatan Sipl Inisiasi						Peningkatan Kinerja dengan kepastian Dokumen Keperencanaan yang akurat						
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP)					Presentase Peningkatan Jumlah surat dan prasarana pelayanan yang diproses	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENEWAKHMAN DAERAH KABUPATENKOTA					
		√	√	√	√	Presentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah diproses dari yang sebelumnya						
		√	√	√	√	Presentase Peningkatan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah diproses dan yang sebelumnya						
		√	√	√	√	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebelumnya						
		√	√	√	√	Jumlah dokumen reja dan pinjaman reja SOPD yang diselesaikan						
		√	√	√	√	Jumlah dokumen CPA,OPDA, SPKML, Monev, SIPP, Rencana RB dan PPK, LKPD, LAKIP dan UPRD (UKPD yang diselesaikan sebelumnya						
		√	√	√	√	Tersedianya Dokumen Laporan IKM						
		√	√	√	√	Tersedianya laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						
		√	√	√	√	Tersedianya Laporan Keuangan Daerah						
						PAJAU ANGGARAN (Rp.)						
		TK I	TK II	TK III	TK IV	TK I	TK II	TK III	TK IV			
						4.911.709.942	2.447.870.180	8.198.826.380	428.617.490			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Perencanaan Dokumen						
						Perencanaan Perangkat Daerah						
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SOPD						
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGAIATAN / SUB KEGIATAN	PAUJ ANGGARAN (Rp.)				
		TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV				TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV	
		✓	✓	✓	✓	Jumlah Pegawai ASN yang bekerja Dag dan	Persediaan Dag dan Tunjangan ASN						
		✓	✓	✓	✓	Tujuan/Output sebagai berikut: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang diterbitkan	Kontribut dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah dokumen laporan keuangan sementara yang diterbitkan	Kontribut dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD						
		✓	✓	✓	✓	Administrasi Umum berjalan dengan baik	Administrasi Umum Terangkas Daerah						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah korporasi instansi baik/perwakilan bangunan kantor yang dibudidayakan	Privatisasi Korporasi Instansi (LSPK) Perwakilan Bangunan Kantor						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah peraturan dan pengendalian kantor yang dilaksanakan	Penelitian Peraturan dan Pengendalian Kantor						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah jenis peraturan umum berupa pelaksanaan yang terwujud	Penyediaan Peraturan Umum Tangga						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah Logistik / makanan dan minuman yang disiapkan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah barang cetakan yang dibudidayakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah surat kabar/jurnal yang dibudidayakan	Penyediaan Bahan Sajian dan Pemburu Penyumbang-undangan						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah jenis ATK yang terwujud	Penyediaan Bahan Material						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah undangan rapat koordinat dan konsultasi ke luar daerah	Penyenggaraan Rapat Koordinat dan Konsultasi SKPD						
		✓	✓	✓	✓	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemantuan Daerah						
		✓	✓	✓	✓	Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah Riset yang di bayar	Penelitian Jasa Riset dan LSPK						
		✓	✓	✓	✓	Jumlah peraturan dan pengendalian kantor yang diterbitkan	Penelitian Jasa Peraturan dan Pengendalian Kantor						
		✓	✓	✓	✓	Terwujudnya Barang Milik Daerah	Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

NO	ABSTRAKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/RELIAPAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PADU ANGGARAN (Rp.)				
		TK I	TK II	TK III	TK IV				TK I	TK II	TK III	TK IV	
		✓	✓	✓	✓	Jumlah STPK kendaraan beroda roda empat yang terdapat		Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pasokan Kendaraan Perbaikan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan					
		✓	✓	✓	✓	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dengan bentuk body lainan dan nyaman dan aman.		Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pasok dan Perbaikan Kendaraan Dinas					
		✓	✓	✓	✓	Jumlah gedung kantor yang dilengkapi dengan baik (bersih, aman dan nyaman) dan biaya diwakili		Operasional dan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					


 Cirebon, 02 Februari 2022
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
KOMALUON, SE
 NIP. 197190411982011007

NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/RELUANAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAJAU ANGGARAN (Rp.)					
		TK I	TK II	TK III	TK IV				TK I	TK II	TK III	TK IV		
						Jumlah warga yang terakreditasi Administrasi Pemerintahan Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon		Fasilitas Pendataan Penduduk						
						Presentase Cakupan Jumlah keluarga yang sudah memiliki Dokumen	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			64.316.100	78.976.400	121.112.800	70.278.200	
						presentase pemenuhan pelayanan Akta-akta kelahiran sipil								
						Presentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil						
						Terdapatnya Dokumen Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak		Pencatatan, Registrasi dan Pemberian Dokumen atas Pelayanan Perbaikan Perbiting						
						Dihasilkan Akta Kelahiran digital berbasis IT		Peningkatan sistem Pelayanan Pencatatan Sipil						
						Jumlah laporan pelayanan akta kelahiran secara mobil								
						Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGOLOKAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			74.528.600	78.260.000	134.231.800	84.371.000	
						Jumlah OPD dan Desa yang telah memitigasi								
						Penerapan Aplikasi SIMK di Kabupaten Cirebon								
						Peningkatan kualitas Database Kependudukan								
						Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan								
						Terdapatnya Database Kependudukan yang valid		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
						Database Penduduk yang valid		Pengujian dan Penyajian Data Kependudukan						

NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/RELIABILIAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAOK ANGGARAN (Rp.)					
		TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV				TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV		
						<p>Dorongan Paksaan Pemindahan Data dan Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat</p> <p>Terpelaksana dan Terselesaikan dengan Baik</p> <p>Bantuan dan Teknisi/tenaga BAK Ormas di 40 Kwa dan Dinas Terpelaksana dan Terselesaikan BAK Ormas di 40 Kecamatan dan 1 Kota</p> <p>Peranmasa Ujicoba Pemindahan Data Profil Kecamatan</p> <p>Terselesaikan Data Profil Kecamatan</p> <p>Terselesaikan Pengantar Prodi Terselesaikan</p>								
						PROGRAM Fasilitasi KEMERDEKAAN KEPERBUKUKAN	<p>Kegiatan Pemindahan Data/Keperbukukan</p> <p>Berkembangnya Pengabdian Intimasi Administrasi Keperbukukan</p> <p>Perbaikan Data Keperbukukan yang Akurat dan Dapat Diakses/Keperbukukan</p> <p>Penyusunan Profil Kecamatan</p> <p>Pengantar Prodi Data Keperbukukan dan Prodi Keperbukukan serta kebukukan lainnya</p>							
								4.952.000	7.682.000	27.818.000	7.682.000			

Banjeng, 03 Februari 2022

Kepala Dinas Keperbukukan dan
Kecamatan Sili Kabupaten Cirebon


 KEMANUBH, SE
 NIP. 19630811982001001

OUTPUT/KUANTITAS	PROGRAM	KELOMPOK / SUB REGISTRAN	PADA ANGGARAN 1991												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
Jumlah surat lamaran yang diterima		Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perikanan	587.500	587.500	1.175.000	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	3.387.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	1.175.000
Jumlah jenis ATN yang diterima		Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perikanan	-	-	507.705.200	1.388.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah undangan yang dikirimkan dan wawancara ke luar negeri		Pengembangan Kapasitas dan Konsultasi SIKPO	-	2.802.500	421.000	17.863.700	1.100.000	-	-	21.650.200	1.100.000	-	-	8.178.750	-
Tempatnya Jasa Pemanggilan Utusan Perwakilan Daerah		Pengadaan Jasa Pemanggilan Utusan Perwakilan Daerah	21.205.000	21.425.000	21.625.000	24.255.000	23.885.000	22.665.000	24.355.000	23.275.000	22.845.000	28.115.000	20.205.000	20.205.000	-
Jumlah pembelian yang di terima		Pengadaan Jasa Konsultasi, Survei dan Bimbingan Teknis	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000
Jumlah pembelian dan pendistribusian bahan yang diterima		Pengadaan Jasa Pemanggilan Utusan Perwakilan Daerah	1.000.000	1.220.000	2.420.000	4.052.000	3.682.000	2.860.000	4.050.000	1.070.000	2.480.000	2.910.000	-	-	-
Tempatnya Jasa Pemanggilan Utusan Perwakilan Daerah		Pengadaan Jasa Pemanggilan Utusan Perwakilan Daerah	19.902.000	240.902.000	21.848.790	20.702.000	22.848.150	20.502.000	25.058.000	11.202.000	21.072.000	21.448.790	19.902.000	21.062.000	-
Jumlah STN kendaraan bermotor roda empat yang terdistribusikan		Pengadaan Jasa Pemanggilan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	-	700.000	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	1.415.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	1.100.000
Jumlah kendaraan disuplai/menerima roda empat dengan tenaga bak (motor dan mesin) dan tetap pakai		Pengadaan Jasa Pemanggilan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000
Jumlah gandum untuk yang dipulihkan dengan tak (sandi erosa dan nyaman) dan tidak dipulihkan		Pembelian/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.278.000	231.278.000	22.002.740	21.278.000	13.000.000	11.278.000	13.012.000	11.278.000	11.278.000	11.278.000	22.002.740	11.278.000	11.278.000



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIENDANG

 02 Februari 2022

Pdt. Triandri Satrio Kusumadewi dan

 Pdt. Nurhidayah Satrio Kusumadewi

 Ketua Kantor Kecamatan Cirebon



 G. KURNIAWATI, S.E.

 NIP. 19670605 199203 1 007

Rincian Anggaran (Rp.)

DURASI/RELEVANSI	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Periode Pelaksanaan												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Perencanaan kegiatan Administrasi Tenaga Pelayanan Administrasi Keperawatan		Pengumpulan Data Keperawatan dan Penelitian dan Penyajian Data Keperawatan	-	2.800.000	5.378.800	80.281.000	5.500.000	8.835.000	6.388.800	8.500.000	2.804.000	2.500.000	8.170.000	8.500.000	2.900.000
Terseminasi Databases/Keperawatan yang valid															
Datuman Fasilitas yang ada		Pengumpulan Data Keperawatan Dokter/Keperawatan Keperawatan Keperawatan Keperawatan	-	-	900.000	17.090.000	2.400.000	430.000	2.400.000	-					
Daftar Fasilitas Perawatan Data yang Apakah yang dapat diakses dari internet?				1.900.000	4.872.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.348.800	1.300.000	1.300.000	6.170.000	1.300.000	2.900.000
Terseminasi dan Keperawatan Jaringan SIAM dengan baik		Pengembangan Pengembangan Sistem Administrasi Keperawatan	4.311.000	81.138.000	16.600.000	6.511.000	16.511.000	6.511.000	16.511.000	16.511.000	17.361.000	16.511.000	16.889.000	6.511.000	6.511.000
Berikutnya dan Terseminasi Data Online di 40 Rencan dan Data		Pengujian Data Keperawatan Yang Harus Dan Data Keperawatan	4.111.000	38.136.000	18.600.000	6.511.000	16.511.000	6.511.000	16.511.000	16.511.000	17.361.000	16.511.000	16.889.000	6.511.000	6.511.000
Terseminasi dan Terseminasi SIAM Online di 40 Rencan dan Data															
Persentase Update Penelitian Data Prati Keperawatan	PROJEKSI PERIODISASI PROFIT administrasi	Pengumpulan Data Keperawatan Keperawatan Prati Data Keperawatan dan Prati Keperawatan serta Keperawatan	1.654.000	1.654.000	1.654.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	1.654.000	23.838.000	2.804.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
Terseminasi Data Prati Keperawatan Keperawatan Prati Keperawatan			1.654.000	1.654.000	1.654.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	1.654.000	23.838.000	2.804.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0054	Belanja Pembelian Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	940.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.843.603.414,00	1.368.676.212,00	84,99	1.548.032.925,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.586.628.414,00	1.335.271.682,00	84,18	1.549.979.787,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Sekretaris atau Pembantu, Mediator, Pemuka Agama, dan Panitia	31.800.000,00	15.853.000,00	39,64	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknis/Informatika dan Pengelola Website	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00	26.700.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	874.700.000,00	855.600.000,00	97,87	874.700.000,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.700.000,00	52.700.000,00	100,00	52.700.000,00
5.1.02.02.01.0079	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80.000.000,00	76.581.329,00	95,73	78.900.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	80.000.000,00	87.172.752,00	98,84	88.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi	83.450.000,00	83.454.000,00	100,00	56.800.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Penyalangan, Instalasi, Film, dan Perawatan	28.500.000,00	16.710.000,00	38,64	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0058	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	708.000,00	19,33	700.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.600.000,00	1.048.000,00	8,30	5.100.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	203.886.914,00	121.828.481,00	38,63	185.801.848,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Buletin Komunitas	15.876.000,00	14.988.000,00	97,72	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faktor/Blowout/TV Berlangganan	50.000.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.1.02.02.01.0084	Belanja Rokok/Pengiriman	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bua, dan Permis	12.582.500,00	9.407.100,00	86,78	1.508.000,00
5.1.02.02.01.0072	Belanja Lendir	0,00	0,00	0,00	94.701.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Jasa JamINAN/Korupsi	88.708.000,00	42.234.450,00	61,23	49.234.138,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	36.871.658,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	58.536.000,00	37.539.534,00	64,14	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	3.818.000,00	2.097.535,00	34,81	0,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Jasa Jaminan Sosial bagi Non ASN	4.452.000,00	2.397.908,00	38,25	3.282.480,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Perabotan dan Meubel	12.177.000,00	11.220.000,00	92,14	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Meubel Perabotan (Penggantian)	12.177.000,00	11.220.000,00	92,14	0,00
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Perabotan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Perabotan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konstruksi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan Teknis/jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konstruksi Mon Konstruksi	188.000.000,00	178.900.000,00	95,14	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konstruksi Berantrasi Bidang Tdmanika	188.000.000,00	178.900.000,00	95,14	0,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kurasi/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	234.900.998,00	217.524.358,00	92,52	83.826.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Meubel	156.490.000,00	153.405.350,00	97,92	21.826.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Meubel Angkutan-Meubel Angkutan Darat Bermanfaat-Gedung/Dinas/Berwujud Perawatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Meubel Kaki	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggantian)	0,00	0,00	0,00	6.716.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pemukiman	16.370.000,00	16.370.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer-jaringan	0,00	0,00	0,00	20.970.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persepsi Komputer	25.040.000,00	34.845.000,00	99,30	0,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	8.280.000,00	4.059.000,00	71,01	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	31.850.000,00	25.121.000,00	61,80	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	73.750.000,00	73.199.350,00	99,25	0,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.410.998,00	63.718.000,00	83,39	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	76.410.998,00	63.718.000,00	83,39	0,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	353.337.200,00	288.826.003,00	76,00	124.773.297,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.237.200,00	268.238.000,00	78,00	136.773.287,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.375.000,00	79.325.000,00	78,80	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000,00	16.850.000,00	65,10	50.775.260,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220.182.200,00	181.653.000,00	76,27	75.998.297,00
5.2.	BELANJA MODAL	3.073.339.000,00	2.334.274.700,00	77,20	24.465.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	2.957.895.000,00	2.334.274.700,00	78,91	0,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Bantu	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	58.212.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	58.212.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0007.	Belanja Modal Alat Pemasaran	58.212.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.627.000,00	48.125.000,00	98,90	0,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.082.000,00	6.075.000,00	99,88	0,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Persekitan	6.082.000,00	6.075.000,00	99,88	0,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Kapal Pejabat	43.545.000,00	43.050.000,00	98,86	0,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	21.980.000,00	21.375.000,00	98,58	0,00
5.2.02.05.03.0008.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	21.565.000,00	21.675.000,00	99,94	0,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	194.776.200,00	194.574.200,00	99,89	0,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	188.182.200,00	188.921.200,00	99,81	0,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	0,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	102.893.200,00	102.940.000,00	99,96	0,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.111.000,00	8.111.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Peralatan Pemasaran	34.613.000,00	34.613.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0008.	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0046.	Belanja Modal Peralatan Perlangkapan Radio	34.613.000,00	34.613.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.795.378.000,00	2.890.813.300,00	91,04	0,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	1.238.743.000,00	1.894.875.300,00	95,96	0,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	1.238.743.000,00	1.894.875.300,00	95,96	0,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.054.636.000,00	1.025.740.000,00	97,28	0,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.007.336.000,00	876.440.000,00	96,93	0,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	34.300.000,00	36.300.000,00	100,00	0,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.894.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.894.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.894.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	63.894.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	13.345.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2.04.02.06.0001.	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
5.2.05.08.01.0001.	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	-18.285.745.100,00	-18.648.807.532,00		-13.103.696.760,00

SUMBER: 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran



DR. H. ARI SETIADI, Drs., MPA.
NIP. 19631224 198003 1 004